



**KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non-Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Daftar, Pemberkasan dan Pelaporan serta Penyerahan Arsip Terjaga;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis Sebagai Informasi Publik;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Aktif di *Central File* di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkaitan dengan arsip.
4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip di Lingkungan Bakamla RI merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Bakamla RI dalam rangka pengelolaan arsip dinamis.
- (2) Klasifikasi arsip di lingkungan Bakamla RI menggunakan klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (3) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan, penataan dan penemuan kembali arsip aktif.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip di Lingkungan Bakamla RI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Sejak Peraturan Kepala ini ditetapkan, maka Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Maret 2020

Kepala Bakamla RI



Aan Kurnia, S.Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI

**KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**

FUNGSI FASILITATIF

PR PERENCANAAN

PR.01 Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan

- PR.01.01 Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP)**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP), mulai dari usulan rencana kegiatan bidang, penyusunan draft awal, penyusunan draf akhir, sampai dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP)
- PR.01.02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)**
Naskah yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), mulai dari usulan rencana kegiatan bidang, penyusunan draft awal, penyusunan draf akhir, sampai dengan penetapan Rencana Pembangunan Menengah (RPJM)
- PR.01.03 Rencana Strategis (Renstra)**
Naskah yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra), mulai dari usulan rencana kegiatan bidang, penyusunan draft awal, penyusunan draf akhir, sampai dengan penetapan Rencana Strategis (Renstra)
- PR.01.04 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional**
Naskah yang berkaitan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

PR.02 Rencana Kerja

- PR.02.01 Usulan Kegiatan Unit Kerja**
Naskah yang berkaitan dengan usulan kegiatan dari unit kerja dalam rangka penyusunan rencana kerja instansi.
- PR.02.02 Rencana Kerja Tahunan**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan, meliputi antara lain, usulan rencana kerja dari unit kerja, sampai dengan penetapan rencana kerja tahunan oleh pimpinan.
- PR.02.03 Rencana kerja berdasar pagu Indikatif**
Naskah yang berkaitan dengan rencana kerja berdasar pagu Indikatif, antara lain meliputi, usulan rencana kerja dari unit kerja, sampai dengan penetapan rencana kerja berdasar pagu Indikatif oleh pimpinan.
- PR.02.04 Inisiatif Baru (New Inisiatif)**
Naskah yang berkaitan dengan rencana kerja inisiatif baru/new inisiatif

PR.03 Penetapan/ Kontrak Kinerja

- PR.03.01 Kepala Badan Keamanan Laut**
Naskah yang berkaitan dengan penetapan/kontrak kinerja Kepala Badan Keamanan Laut, beserta data pendukungnya.
- PR.03.02 Pimpinan Unit Kerja**
Naskah yang berkaitan dengan penetapan/ kontrak kinerja pimpinan unit kerja, beserta data pendukungnya
- PR.03.03 Staf / Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum**
Naskah yang berkaitan dengan penetapan/ kontrak kinerja staf/pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum, beserta data pendukungnya
- PR.04 Perencanaan Anggaran**
- PR.04.01 Penyusunan Rencana Anggaran (RKAKL, DIPA, POK)**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran (RKAKL, DIPA Murni, POK Awal), antara lain : usulan rencana anggaran dari berbagai unit kerja dan arsip data komputer rencana RKAKL
- PR.04.02 Perencanaan PNB**
Naskah yang berkaitan dengan perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- PR.04.03 Standarisasi Harga Satuan Perencana Barang**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan standarisasi harga satuan perencana barang.
- PR.04.04 Standar Biaya Keluaran**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar biaya keluaran.
- PR.05 Revisi Anggaran**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran.
- PR.06 Laporan**
- PR.06.01 Laporan Berkala**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Berkala, meliputi: Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Laporan Semesteran, Laporan Tahunan Unit Kerja, dan Laporan Tahunan Badan mulai dari penyusunan draft sampai pengesahan dari pimpinan
- PR.06.02 Laporan Khusus**
Naskah yang berkaitan dengan laporan khusus antara lain laporan pemantauan prioritas, laporan e-monev, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, laporan pelaksanaan kegiatan insidental dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti pidato presiden dan lain-lain.
- PR.06.03 Laporan Perkembangan Tahapan Kegiatan / Progress Report**
Naskah yang berkaitan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun)
- PR.06.04 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**
Naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal

- PR.07 Evaluasi Program**
Naskah yang berkaitan dengan evaluasi program, meliputi Evaluasi Program Unit Kerja, dan Evaluasi Program Badan Keamanan Laut.
- OT ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN**
- OT.01 Organisasi**
- OT.01.01 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**
Naskah yang berkaitan dengan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Bakamla meliputi: analisa organisasi, pembentukan, perubahan, pembubaran organisasi.
- OT.01.02 Evaluasi Organisasi**
Naskah yang berkaitan dengan evaluasi organisasi
- OT.02 Analisis Jabatan**
- OT.02.01 Analisis Jabatan Struktural**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan struktural.
- OT.02.02 Analisis Jabatan Fungsional Tertentu**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional tertentu.
- OT.02.03 Analisis Jabatan Fungsional Umum**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional umum.
- OT.03 Analisis Beban Kerja (ABK)**
Naskah yang berkaitan dengan pengukuran beban kerja jabatan dan unit kerja serta pemetaan kekuatan pegawai di unit kerja.
- OT.04 Standar Kompetensi Jabatan**
- OT.04.01 Standar Kompetensi Jabatan Struktural**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan struktural
- OT.04.02 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional tertentu.
- OT.05 Ketatalaksanaan**
- OT.05.01 Penetapan/Penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP)**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penetapan/Penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP) mulai dari usulan dari unit kerja, pembahasan, pengesahan, hingga evaluasi atas implementasi SOP.
- OT.05.02 Tata Hubungan Kerja**
Naskah yang berkaitan dengan tata hubungan kerja antar struktural, antar fungsional serta tata hubungan kerja antar struktural dan fungsional

- OT.06 Reformasi Birokrasi**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi, termasuk diantaranya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- HM HUBUNGAN MASYARAKAT**
- HM.01 Keprotokolan**
- HM.01.01 Upacara Kedinasan**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler meliputi kegiatan: upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, serah terima jabatan, peresmian, dengan data pendukung antara lain: surat undangan, susunan acara, naskah serah terima, sambutan/pidato, dan lain-lain.
- HM.01.02 Kunjungan Kedinasan**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan kedinasan dari dan ke instansi lain baik dalam maupun luar negeri, meliputi Kunjungan Dinas Pimpinan Lembaga/Instansi/Tamu Negara, dan kunjungan dinas pejabat lain/pegawai.
- HM.01.03 Dokumentasi/Liputan**
Naskah yang berkaitan dengan dokumentasi/ liputan kegiatan pimpinan dalam acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa dalam berbagai media: kertas/foto/video/ rekaman.
- HM.01.04 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan**
Naskah yang berkaitan dengan pengumpulan pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan, melalui antara lain: klipping koran, brosur/leaflet/poster, spanduk, pengumuman/pemberitahuan, dan lain-lain.
- HM.02 Hubungan Antar Lembaga**
- HM.02.01 Hubungan dengan Lembaga Negara**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan Lembaga Negara.
- HM.02.02 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan Perguruan Tinggi/Sekolah termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG), Praktek Kerja Lapangan (PKL).
- HM.02.03 Hubungan dengan Perusahaan**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan perusahaan.
- HM.02.04 Hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi kemasyarakatan.
- HM.02.05 Hubungan dengan Forum Kehumasan/Bakohumas/Perhumas**
Naskah yang berkaitan dengan forum kehumasan/bakohumas
- HM.02.06 Hubungan dengan Media Massa**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan media massa meliputi siaran pers/konferensi pers/press release, kunjungan wartawan/peliputan, wawancara

- HM.03 Hearing (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR**
Naskah yang berkaitan dengan Dengar Pendapat/Hearing DPR, meliputi: surat undangan RDP, bahan/materi RDP, laporan mengikuti RDP
- HM.04 Bahan/materi pidato/sidang MPR, DPR, DPD, kabinet**
Naskah yang berkaitan dengan Bahan/materi pidato/sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet.
- HM.05 Penerbitan**
Naskah yang berkaitan dengan Penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal
- HM.06 Publikasi**
Naskah yang berkaitan dengan Publikasi melalui media cetak maupun elektronik dan monitoring media/ analisis media cetak maupun elektronik.
- HM.07 Pameran/Sayembara, Festival**
Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pameran/sayembara, festival , mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- HM.08 Penghargaan Kelembagaan**
Naskah yang berkaitan dengan Penghargaan Kelembagaan baik yang diterima maupun yang diberikan.
- HM.09 Ucapan**
Naskah yang berkaitan dengan pemberian Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf
- HM.10 Layanan Informasi Publik (PPID)**
Naskah yang berkaitan dengan Layanan Informasi Publik (PPID), meliputi: Pedoman Tata Tertib Layanan, Formulir Isian Layanan Publik, Prosedur Layanan Publik, Pelaksanaan Pelayanan Publik, Laporan Pelaksanaan Layanan Publik , Aspirasi Publik.
- HM.11 Dokumen Hosting dan Domain**
Naskah yang berkaitan dengan dokumen hosting.
- TU TATA USAHA**
- TU.01 Agenda Kegiatan Pimpinan**
Naskah yang berkaitan dengan Agenda kegiatan Badan, meliputi antara lain: jadwal kegiatan pimpinan tinggi Badan, dan lain-lain.
- TU.02 Risalah/Notulen Rapat Pimpinan**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Risalah Rapat pimpinan.
- KA KEARSIPAN**
- KA.01 Administrasi Persuratan**
Naskah yang berkaitan dengan Agenda Surat, Tanda Terima, Buku Pendistribusian Surat, Agenda Penomoran Surat, dll .
- KA.02 Pemeliharaan dan Penggunaan Arsip**
- KA.02.01 Pengelolaan Arsip Aktif**
Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan arsip aktif termasuk Pemberkasan Arsip Aktif, meliputi: Daftar Arsip Aktif (Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas), Laporan Pengelolaan Arsip Aktif, dan lain-lain.

- KA.02.02 Pengelolaan Arsip Inaktif**
Naskah yang berkaitan dengan Penataan Arsip, meliputi: Daftar Arsip Inaktif, Laporan Penataan Arsip Inaktif, dan lain-lain.
- KA.02.03 Penyimpanan Arsip**
Naskah yang berkaitan dengan Penyimpanan, meliputi: Skema Penataan Arsip, Peta Lokasi Penyimpanan Arsip, Cheklist pengaturan suhu dan temperatur ruang penyimpanan, Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi), Perawatan Arsip dan ruang penyimpanan (fumigasi), dan lain-lain.
- KA.02.04 Alih Media Arsip**
Naskah yang berkaitan dengan Berkas proses alih media arsip, meliputi: Berita Acara Alih Media Arsip, Daftar Arsip yang dialih mediakan.
- KA.02.05 Akses Penggunaan Arsip**
Naskah yang berkaitan dengan Akses penggunaan arsip, meliputi: formujir peminjaman, Buku Peminjaman Arsip, dan lain-lain.
- KA.03 Pengelolaan Arsip Vital**
Naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Arsip Vital, meliputi: Daftar Arsip Vital, dan lain-lain
- KA.04 Pengelolaan Arsip Terjaga**
Naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Arsip Terjaga, meliputi: Daftar Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan salinan otentik Arsip Terjaga, dan lain-lain
- KA.05 Penyusutan Arsip**
- KA.05.01 Pemindahan Arsip**
Naskah yang berkaitan dengan Pemindahan arsip inaktif , meliputi: daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan, Berita Acara Pemindahan Arsip, dan lain-lain.
- KA.05.02 Pemusnahan Arsip**
Naskah yang berkaitan dengan Pemusnahan Arsip Inaktif, meliputi: usulan pemusnahan, rekomendasi/pertimbangan/ persetujuan pemusnahan dari ANRI, keputusan pemusnahan, berita acara pemusnahan dan daftar arsip musnah, SK Panitia Pemusnahan, Notula, dan lain-lain.
- KA.05.03 Penyerahan Arsip Statis**
Naskah yang berkaitan dengan Penyerahan arsip statis, meliputi: Surat Usulan Penyerahan Arsip Statis, Rekomendasi/Pertimbangan/Persetujuan Penyerahan Arsip, daftar arsip usulserah, beritaacara penyerahanarsip statis , dan lain-lain.
- KA.06 Pembuatan Sistem Kearsipan**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Sistem Kearsipan baik manual maupun elektronik, meliputi Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip, dan lain-lain
- KA.07 Pembinaan Kearsipan**
- KA.07.01 Bimbingan Teknis Kearsipan/ Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan**
Naskah yang berkaitan dengan Bimbingan Teknis Kearsipan/ Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan, mulai dari perencanaan, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan .

- KA.07.02 Apresiasi/Sosialisasi/Penyuluhan/Lomba Kearsipan**
Naskah yang berkaitan dengan Apresiasi/Sosialisasi/ Penyuluhan/Lomba Kearsipan, mulai dari perencanaan, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- KA.07.03 Supervisi/ Pengawasan/Monitoring Kearsipan**
Naskah yang berkaitan dengan Supervisi/ Pengawasan/Monitoring Kearsipan , mulai dari perencanaan, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan Laporan Hasil supervisi/Pengawasan Kearsipan , dan lain-lain

PT KEPUSTAKAAN

- PT.01 Pengelolaan Bahan Pustaka**
Naskah yang berkaitan dengan Pengolahan Bahan Pustaka, meliputi: Buku induk koleksi, Daftar buku terseleksi, Daftar pemesanan buku, Daftar permintaan buku, Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah/deposit/hibah, Daftar pengiriman Bahan Pustaka Surplus, kartu peminjaman, dan lain-lain.
- PT.02 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka**
Naskah yang berkaitan dengan Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka yang meliputi: Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit, Administrasi pengolahan Deposit Bahan Pustaka
- PT.03 Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi**
- PT.03.01 Data dan Statistik Anggota**
Naskah yang berkaitan dengan Data dan statistik anggota,
- PT.03.02 Daftar Pengunjung dan Peminjam**
Naskah yang berkaitan dengan daftar pengunjung dan peminjaman bahan pustaka,
- PT.03.03 Rujukan**
Naskah yang berkaitan dengan pertanyaan rujukan dan jawabannya

KP KEPEGAWAIAN

- KP.01 Bezzeting/Persediaan Pegawai**
Naskah yang berkaitan dengan Bezzeting/Persediaan Pegawai
- KP.02 Formasi Pegawai**
- KP.02.01 Usulan dari Unit Kerja**
Naskah yang berkaitan dengan usulan dari unit kerja termasuk di dalamnya analisa jabatan, analisa beban kerja
- KP.02.02 Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB**
Naskah yang berkaitan dengan usulan permintaan formasi dengan data pendukung surat permintaan persetujuan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- KP.02.03 Persetujuan formasi dari Menpan**
Naskah yang berkaitan dengan persetujuan formasi dari Menpan dan RB, termasuk di dalamnya surat persetujuan formasi dari Menpan dan RB

- KP.02.04 Penetapan formasi**
Naskah yang berkaitan dengan penetapan formasi termasuk di dalamnya SK Penetapan Formasi
- KP.02.05 Penetapan formasi khusus**
Naskah yang berkaitan dengan Penetapan formasi khusus, termasuk di dalamnya SK Penetapan Formasi Khusus
- KP.03 Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN)**
- KP.03.01 Proses Penerimaan Pegawai**
Naskah yang berkaitan Proses Penerimaan Pegawai mulai dari pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, pelaksanaan ujian kesehatan, kemampuan bidang, keputusan hasil ujian, wawancara sampai dengan keputusan kelulusan
- KP.03.02 Penetapan Pengumuman Kelulusan**
Naskah yang berkaitan Penetapan Pengumuman Kelulusan dalam rangka kegiatan pengadaan ASN
- KP.03.03 Berkas lamaran yang tidak diterima**
Naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima, antara lain: surat lamaran, ijazah, SKCK, Kartu Kuning, surat keterangan dokter, dan lain-lain.
- KP.03.04 Nota usul dan kelengkapan penetapan NIP**
Naskah yang berkaitan dengan Nota usul dan kelengkapan penetapan NIP, antara lain surat lamaran, ijazah, SKCK, kartu kuning, surat keterangan dokter, dan lain-lain.
- KP.03.05 Nota usul dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun**
Naskah yang berkaitan dengan Nota usul dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun,
- KP.03.06 SK CASN/ASN Kolektif**
Naskah yang berkaitan dengan SK CASN/ASN Kolektif.
- KP.03.07 Prajabatan**
Naskah yang berkaitan dengan Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Evaluasi Pendidikan Prajabatan.
- KP.04 Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/ Pegawai Kontrak)**
- KP.04.01 Proses Penerimaan ASN P3K**
Naskah yang berkaitan dengan Proses Penerimaan ASN P3K, antara lain: pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, pelaksanaan ujian kesehatan, kemampuan bidang, keputusan hasil ujian, wawancara, dan lain-lain.
- KP.04.02 Penetapan Pengumuman Kelulusan**
Naskah yang berkaitan dengan Penetapan Pengumuman Kelulusan
- KP.04.03 Pengangkatan ASN P3K**
Naskah yang berkaitan dengan Pengangkatan ASN P3K, antara lain: surat lamaran, ijazah, SKCK, Kartu Kuning, surat keterangan dokter, dan lain-lain
- KP.04.04 Berkas Lamaran ASN P3K Yang Tidak Diterima**
Naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima, antara lain: surat lamaran, ijazah, SKCK, Kartu Kuning, surat keterangan dokter, dan lain-lain

- KP.05 Pengadaan Pegawai Honoror/ Harian Lepas**
- KP.05.01 Proses Penerimaan Pegawai**
Naskah yang berkaitan dengan Proses Penerimaan Pegawai, antara lain: pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, pelaksanaan ujian kesehatan, kemampuan bidang, keputusan hasil ujian, wawancara
- KP.05.02 Penetapan Pengumuman Kelulusan**
Naskah yang berkaitan dengan Penetapan Pengumuman Kelulusan
- KP.05.03 Pengangkatan Pegawai Honoror/ Harian Lepas**
Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai honoror/ harian lepas, antara lain, surat lamaran, ijazah, SKCK, Kartu Kuning, surat keterangan dokter, dan lain-lain.
- KP.05.04 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima**
Naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima antara lain, surat lamaran, ijazah, SKCK, Kartu Kuning, surat keterangan dokter, dan lain-lain.
- KP.05.05 Pengangkatan Pegawai Honoror/ Harian Lepas**
Naskah yang berkaitan dengan Pengangkatan Pengadaan Pegawai Honoror/ Harian Lepas, antara lain: SK Pemimpin PPPA tentang Pengangkatan Pegawai Honoror/ Harian Lepas
- KP.06 Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)**
Naskah yang berkaitan proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama mulai dari pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, assessment center, kompetensi bidang, keputusan hasil ujian, wawancara sampai dengan keputusan kelulusan.
- KP.07 Pembinaan/ Pengembangan Karir Pegawai**
- KP.07.01 Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ujian dinas**
Naskah yang berkaitan dengan Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ujian dinas, antara lain: edaran/ pengumuman berkenaan dengan studi lanjut, surat menyurat permohonan atau usulan studi, laporan hasil tes masuk , ikatan kerja dan surat perjanjian ijin/tugas belajar, surat perintah/tugas belajar/ sk/surat ijin, laporan perkembangan studi, ijazah, akreditasi program studi, STTPL, Sertifikat, dan lain-lain.
- KP.07.02 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)**
Naskah yang berkaitan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- KP.07.03 Pakta Integritas**
Naskah yang berkaitan dengan Pakta Integritas.
- KP.07.04 Penetapan Angka Kredit (PAK)**
Naskah yang berkaitan dengan Penetapan Angka Kredit (PAK), yaitu: Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK), dan Pengajuan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional.
- KP.07.05 Disiplin pegawai**
Naskah yang berkaitan dengan Disiplin pegawai, yaitu: Daftar Hadir Pegawai dan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai.

- KP.07.06 Hukuman disiplin**
Naskah yang berkaitan dengan Hukuman disiplin, antara lain: surat pemanggilan, surat peringatan, Berita Acara Pemeriksaan, Pernyataan Tidak Puas, SK Pemberian Hukuman Disiplin, Permohonan Banding, SK Penetapan Banding.
- KP.07.07 Penghargaan dan tanda jasa**
Naskah yang berkaitan dengan Penghargaan dan tanda jasa seperti kepada Pegawai Berprestasi (Dosen, Arsiparis, Pustakawan, Peneliti, dan lain-lain), antara lain: surat menyurat, SK, Sertifikat/Piagam.
- KP.08 Mutasi Pegawai**
- KP.08.01 Alih Tugas**
Naskah yang berkaitan dengan Alih status, pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan sementara, Pindah sementara, Mutasi antar unit antara lain: surat permohonan, surat alih tugas/perpindahan, surat keputusan, surat tugas, dan nota persetujuan/pertimbangan BKN.
- KP.08.02 Mutasi Keluarga**
Naskah yang berkaitan dengan Mutasi keluarga, antara lain: surat ijin pernikahan/perceraian, surat penolakan ijin, surat nikah/cerai, Akte Kelahiran Anak, Surat Keterangan Adopsi Anak, Surat Keterangan Meninggal dunia.
- KP.08.03 Kenaikan Pangkat/Golongan**
Naskah yang berkaitan dengan Usul kenaikan Pangkat/Golongan, antara lain : Nota Usul Kenaikan Pangkat/ Golongan, SK Kenaikan Pangkat/Golongan.
- KP.08.04 Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai**
Naskah yang berkaitan dengan Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai, mulai dari usulan, nota persetujuan, SK, dan surat persetujuan.
- KP.08.05 Penyesuaian Masa Kerja**
Naskah yang berkaitan dengan Peninjauan masa kerja mulai dari usulan, nota persetujuan, SK, dan surat persetujuan.
- KP.08.06 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)**
Naskah yang berkaitan dengan Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dengan data pendukung surat-menyurat dan notula.
- KP.09 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Struktural**
Naskah yang berkaitan dengan Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural, meliputi: Usulan dan SK Kenaikan Jabatan, Usulan dan SK Pengangkatan Jabatan, Usulan dan SK Pemberhentian Jabatan.
- KP.10 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Fungsional**
Naskah yang berkaitan dengan Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional, meliputi: Usulan dan SK Kenaikan Jabatan, Usulan dan SK Pengangkatan Jabatan, Usulan dan SK Pemberhentian Jabatan.

KP.11 Administrasi Pegawai

- KP.11.01 Cuti besar**
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Cuti besar.
- KP.11.02 Cuti Sakit**
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Cuti Sakit.
- KP.11.03 Cuti Bersalin**
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Cuti Bersalin.
- KP.11.04 Cuti Tahunan**
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Cuti Tahunan.
- KP.11.05 Cuti Alasan Penting**
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti alasan penting.
- KP.11.06 Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN)**
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN).
- KP.11.07 Dokumentasi identitas pegawai**
Naskah yang berkaitan dengan Dokumentasi identitas pegawai, antara lain: Karpeg/KPE/Karis/Karsu, LHKASN (Laporan Harta Kekayaan ASN), LHKKPN (Laporan Harta Kekayaan KPN), Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan, LP2P/SPT Tahunan/NPWP, KP4.
- KP.11.08 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)**
Naskah yang berkaitan dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- KP.11.09 Kenaikan Gaji berkala**
Naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala, mulai dari usulan sampai dengan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala.

KP.12 Penilaian Kompetensi

- KP.12.01 Berkas Penilaian Kompetensi**
Naskah yang berkaitan dengan berkas penilaian uji kompetensi.
- KP.12.02 Hasil Penilaian Kompetensi**
Naskah yang berkaitan dengan penetapan hasil penilaian kompetensi

KP.13 Kesejahteraan Pegawai

- KP.13.01 Layanan Kesehatan Pegawai**
Naskah yang berkaitan dengan Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai, yaitu: rekam medis, kartu anggota, surat keterangan sehat, surat keterangan sakit, dan lain-lain.

- KP.13.02 Asuransi Pegawai/Asuransi Kesehatan/BPJS**
Naskah yang berkaitan dengan Asuransi Pegawai/Asuransi Kesehatan/BPJS, yaitu: administrasi pendaftaran, penawaran asuransi, dan lain-lain
- KP.13.03 Tabungan Perumahan**
Naskah yang berkaitan dengan Tabungan Perumahan
- KP.13.04 Bantuan Sosial**
Naskah yang berkaitan dengan Bantuan Sosial, antara lain: tanda terima, ucapan-ucapan, dan lain-lain.
- KP.13.05 Rekreasi, Olah Raga, Kesenian**
Naskah yang berkaitan dengan Rekreasi, Olah Raga, Kesenian yaitu antara lain: penetapan anggaran, surat-menyurat, laporan pertanggungjawaban, dan lain-lain.
- KP.13.06 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa**
Naskah yang berkaitan dengan pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa.
- KP.14 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian**
Naskah yang berkaitan dengan Perselisihan/ Sengketa kepegawaian, mulai dari pengaduan, laporan, notula, berita acara pemeriksaan, dan surat keputusan.
- KP.15 Pemberhentian pegawai**
Naskah yang berkaitan dengan Pemberhentian pegawai, mulai dari usulan pemberhentian pegawai sampai dengan penetapan pemberhentian pegawai, meliputi, Pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara.
- KP.16 Pemberhentian Karena Pensiun pegawai/janda/duda dan PNS yang Tewas**
Naskah yang berkaitan dengan Usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas , mulai dari usulan, SK pemberhentian, dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda dan ASN yang tewas.
- KP.17 Berkas Perseorangan Kepala**
Naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Kepala BAKAMLA, mulai dari surat lamaran, ijazah, SKCK, Kartu Kuning, surat keterangan dokter, dan data pendukung lainnya, sampai dengan SK Pengangkatan, riwayat jabatan, dsb
- KP.18 Berkas Perseorangan Pegawai ASN/PNS**
Naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai ASN/PNS, mulai dari lamaran pegawai yang diterima, nota penetapan NIP dan kelengkapannya, Nota persetujuan BKN, SK Pengangkatan, SK Kenaikan Pangkat, dan berkas pendukung lainnya sampai dengan SK Pensiun
- KP.19 Berkas Perseorangan ASN P3K/ Honorer**
Naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai ASN P3K/ Honorer, mulai dari lamaran, ijazah, SKCK, Surat keterangan dokter, SK pengangkatan, dan lain-lain.
- KU KEUANGAN**
- KU.01 Pelaksanaan Anggaran**
- KU.01.01 Rencana Anggaran Biaya**
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya mulai dari draf awal sampai dengan penetapan sebagai Rencana Anggaran Biaya.

- KU.01.02 Penggajian**
Naskah yang berkaitan dengan Penggajian pegawai termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya
- KU.01.03 Pengeluaran Anggaran**
Naskah yang berkaitan dengan Pengeluaran pelaksanaan anggaran keluaran, baik yang berupa Petunjuk Pelaksanaan atau mekanisme pengeluaran APBN
- KU.02 Pengelolaan Perbendaharaan**
- KU.02.01 Perbendaharaan**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Perbendaharaan, antara lain: SK Pengangkatan KPA, SK Pengangkatan PPK, SK Pengangkatan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran.
- KU.02.02 Kartu Pengawasan Kredit Anggaran**
Naskah yang berkaitan dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran
- KU.02.03 Pajak**
Naskah yang berkaitan dengan Pajak, meliputi Surat Setoran Pajak, Nota Konfirmasi, dan lain-lain
- KU.02.04 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**
Naskah–naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dalam rangka PNBP, baik berupa Penerimaan Non Pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sampai pengaturan pencairan dana PNBP melalui Maksimum Pencairan Dana (MP).
- KU.02.05 Pengembalian Belanja**
Naskah–naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan pengembalian belanja yang melampaui tahun anggaran berjalan melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- KU.02.06 Berita Acara Pemeriksaan Kas**
Naskah yang berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- KU.02.07 Pembukuan Anggaran**
Naskah–naskah yang berkaitan dengan pembukuan anggaran, berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) dan kartu–kartu realisasi anggaran.
- KU.03 Verifikasi Anggaran**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan meliputi pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/ pengeluaran anggaran.

KU.04 Akuntansi dan Pelaporan

KU.04.01 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Naskah yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang meliputi: Buku Manual Implementasi SAI, dan Berita Acara Rekonsiliasi

KU.04.02 Laporan Keuangan

Naskah yang berkaitan dengan Laporan Keuangan diantaranya Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan

KU.05 Ketatausahaan Keuangan

KU.05.01 Keterangan Penghasilan

Naskah yang berkaitan dengan Keterangan Penghasilan

KU.05.02 Keterangan Pemberhentian Pembayaran

Naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

KU.05.03 Pinjaman

Naskah yang berkaitan dengan Permohonan Pinjaman.

KU.05.04 Iuran Keanggotaan Organisasi

Naskah yang berkaitan dengan Iuran Keanggotaan Organisasi

KU.06 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri

Naskah yang berkaitan dengan Bantuan/Pinjaman Luar Negeri, meliputi: Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book), Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (Grey book), Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya termasuk alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri

KU.07 Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara

Naskah yang berkaitan dengan Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara, yaitu Tuntutan Perbendaharaan/TP dan Tuntutan Ganti Rugi/TGR.

SP SARANA DAN PRASARANA

SP.01 Perencanaan Pengadaan

SP.01.01 Analisa Kebutuhan

Naskah yang berkaitan dengan Analisa Kebutuhan, mulai dari pengumpulan data kebutuhan barang sampai dengan laporan analisa kebutuhan barang.

SP.01.02 Tata Ruang

Naskah yang berkaitan dengan Tata Ruang kantor

SP.01.03 Daftar Rekanan Mampu

Naskah yang berkaitan dengan daftar perusahaan yang memberikan perkenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan

SP.02 Pengadaan Barang dan Jasa

SP.02.01 Alat Tulis Kantor

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Alat Tulis Kantor dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

SP.02.02 Perlengkapan Kantor

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Perlengkapan Kantor seperti PC Komputer, laptop, meja, kursi, lemari, rak, filling kabinet, brankas dan lain sebagainya mulai dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

SP.02.03 Tanah dan Bangunan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Tanah dan Bangunan mulai dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

SP.02.04 Kendaraan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Kendaraan dinas, mulai dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

SP.02.05 Instalasi Jaringan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Instalasi Jaringan listrik, air, telepon, Local Area Network (LAN), mulai dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

SP.02.06 Jasa

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Jasa.

SP.03 Pengelolaan Barang

SP.03.01 Penyimpanan/Pergudangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang dari gudang

SP.03.02 Distribusi /Penyaluran

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi barang untuk kepentingan intern maupun ekstern

SP.03.03 Inventarisasi BMN

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi BMN

SP.03.04 Pendayagunaan BMN

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan BMN

SP.03.05 Penghapusan BMN

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan BMN, meliputi Surat Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan BMN, Daftar barang yang dihapus, laporan hasil pelaksanaan penghapusan BMN

SP.03.06 Hibah

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hibah BMN

SP.03.07 Pelaporan BMN

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan BMN

- SP.04 Bukti Kepemilikan Aset**
Naskah yang berkaitan dengan Bukti-bukti kepemilikan aset , meliputi sertifikat tanah, IMB, PBB, BPKB, STNK, denah/gambar teknik bangunan/instalasi listrik/saluran air dan gas/jaringan internet
- SP.05 Pemeliharaan**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan/perawatan BMN seperti pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi dan server/hosting, pemeliharaan jaringan listrik dan air, perbaikan/service kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor
- RT KERUMAHTANGGAAN**
- RT.01 Perjalanan Dinas Luar Negeri**
Naskah yang berkaitan dengan administrasi pengajuan perjalanan dinas Luar Negeri antara lain surat undangan, surat tugas, administrasi pengurusan visa, surat dari Sekretariat Kabinet, exit permit, SPPD, dan laporan kegiatan perjalanan dinas luar negeri.
- RT.02 Fasilitas**
- RT.02.01 Kendaraan Dinas**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti: formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, laporan kehilangan kendaraan.
- RT.02.02 Telekomunikasi**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan penggunaan sarana telekomunikasi : telepon, radio, teleks/Fax, cctv,tv kabel dan internet meliputi administrasi dan penggunaan peralatannya.
- RT.02.03 Ruang Rapat dan Konsumsi**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya.
- RT.03 Keamanan dan Ketertiban**
- RT.03.01 Pengamanan**
Naskah yang berkaitan dengan Pengamanan/penjagaan terhadap lingkungan kantor dan rumah dinas, pegawai terhadap pejabat yaitu administrasi kegiatan pengamanan/ penjagaan dan pengawalan dan laporan kegiatan pengamanan/penjagaan dan pengawalan.
- RT.03.02 Pengelolaan Parkir**
Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan parkir dan pengaturan akses masuk di lingkungan kantor yang meliputi administrasi dan laporan.
- PW PENGAWASAN**
- PW.01 Program Kerja Pengawasan**
- PW.01.01 Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan**
Naskah yang berkaitan dengan Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan

- PW.01.02 Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional**
Naskah yang berkaitan dengan Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional
- PW.01.03 Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan**
Naskah yang berkaitan dengan Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan.
- PW.01.04 Program AKIP unit kerja**
Naskah yang berkaitan dengan Program AKIP unit kerja di lingkungan
- PW.01.05 Program AKIP BAKAMLA**
Naskah yang berkaitan dengan Program AKIP
- PW.02 Audit**
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan audit kinerja, audit operasional, audit khusus dan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, sampai dengan pelaporan.
- PW.03 Reviu**
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja, reviu rencana anggaran, reviu revisi anggaran, reviu pengelolaan anggaran, reviu rencana kegiatan, reviu pengendalian internal, dan reviu lainnya yang meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, sampai dengan pelaporan.
- PW.04 Evaluasi**
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi SAKIP, evaluasi Reformasi Birokrasi, dan evaluasi lainnya yang meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, sampai dengan pelaporan.
- PW.05 Pemantauan**
- PW.05.01 Pemantauan kegiatan**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan termasuk didalamnya Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK) dan monitoring Reformasi Birokrasi
- PW.05.02 Pemantauan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi tuntutan perbendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
- PW.05.03 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- PW.05.04 Penerapan Early Warning System**
Naskah yang berkaitan dengan Penerapan Early Warning System, termasuk didalamnya Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- PW.05.05 Pemantauan Disiplin Pegawai**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemantauan Disiplin Pegawai

PW.06 Gratifikasi dan Whistle Blowing System (WBS)

Naskah yang berkaitan dengan Pelaporan Gratifikasi dan Whistle Blowing System (WBS)

PW.07 Penguatan Pengawasan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, bimbingan, konsultasi dan asistensi pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, keikutsertaan dalam Forum APIP, Satuan Pengawasan Intern (SPI) / Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan forum komunikasi lainnya.

**KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**

FUNGSI SUBSTANTIF

KB KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT

KB.01 Perumusan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut
Naskah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, mulai dari pengkajian dan pengusulan rencana kebijakan, penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan perumusan kebijakan.

KB.02 Harmonisasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut

KB.02.01 Harmonisasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut
Ketentuan Nasional

Naskah yang berkaitan dengan harmonisasi kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan ketentuan nasional, mulai dari penyiapan hingga penyelenggaraan harmonisasi selesai.

KB.02.02 Harmonisasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut
Ketentuan Internasional

Naskah yang berkaitan dengan harmonisasi kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan ketentuan internasional, mulai dari penyiapan hingga penyelenggaraan harmonisasi selesai.

KB.03 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut

KB.03.01 Monitoring Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring kegiatan penyelenggaraan kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

KB.03.02 Evaluasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

ST STRATEGI KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT

ST.01 Perumusan Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut

ST.01.01 Perencanaan Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan perumusan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

- ST.01.02 Penyiapan Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut**
 Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- ST.02 Harmonisasi Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut**
- ST.02.01 Harmonisasi Strategi Peringatan Dini**
 Naskah yang berkaitan dengan harmonisasi strategi peringatan dini mulai dari penyiapan hingga penyelenggaraan harmonisasi selesai.
- ST.02.02 Harmonisasi Strategi Operasi**
 Naskah yang berkaitan dengan harmonisasi strategi operasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, mulai dari penyiapan hingga penyelenggaraan harmonisasi selesai.
- ST.03 Monitoring dan Evaluasi Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut**
- ST.03.01 Monitoring Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut**
 Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring kegiatan penyelenggaraan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- ST.03.02 Evaluasi Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut**
 Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- LB PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT**
- LB.01 Penelitian Keamanan dan Keselamatan Laut**
- LB.01.01 Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Keamanan dan Keselamatan Laut**
 Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
- LB.01.02 Kerja sama Penelitian dan Pengembangan Keamanan dan Keselamatan Laut**
 Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
- LB.01.03 Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Keamanan dan Keselamatan Laut**
 Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

- OP OPERASI LAUT DAN UDARA MARITIM**
- OP.01 Perencanaan Operasi**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan operasi laut dan udara maritim di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
- OP.01 Penyelenggaraan Operasi Laut**
 - OP.01.01 Operasi Keamanan Laut**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan operasi keamanan laut, seperti: patroli keamanan laut, penyelenggaraan reaksi cepat laut, penindakan terpadu, penyelidikan terpadu, pengejaran terpadu, pengawasan pelanggaran keamanan terpadu, penyimpanan barang hasil penindakan.
 - OP.01.02 Operasi Keselamatan Laut**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan operasi keselamatan laut, seperti: perencanaan operasi, penyelenggaraan reaksi cepat laut, perbantuan pencarian dan pertolongan di laut, perbantuan penanggulangan pencemaran di laut, perbantuan penanggulangan musibah di laut
- OP.02 Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim**
 - OP.01.01 Operasi Udara Pemantauan Maritim**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan operasi Udara Pemantauan Maritim, seperti: perencanaan operasi dan pelaksanaan operasi udara pemantauan maritim terpadu
 - OP.01.02 Operasi Udara Keselamatan Maritim**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan operasi udara keselamatan maritim seperti: perencanaan operasi, perbantuan pencarian dan pertolongan di laut, perbantuan penanggulangan pencemaran di laut, perbantuan penanggulangan musibah di laut
- OP.03 Dukungan Operasi Laut dan Udara Maritim**
 - OP.03.01 Komunikasi Elektronika**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dukungan komunikasi elektronika dalam operasi laut dan udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
 - OP.03.02 Persandian**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dukungan persandian dalam operasi laut dan udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
 - OP.03.03 Avionik**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dukungan avionik dalam operasi laut dan udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
 - OP.03.04 Logistik Operasi**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dukungan logistik dalam operasi laut dan udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

- OP.04 Evaluasi Operasi**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi operasi laut dan udara maritim di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
- LH LATIHAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT**
- LH.01 Perencanaan Latihan**
Naskah yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan operasi laut dan udara maritim di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
- LH.02 Latihan Operasi Laut**
- LH.02.01 Latihan Operasi Keamanan Laut**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan latihan operasi keamanan laut.
- LH.02.02 Latihan Operasi Keselamatan Laut**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan latihan operasi keselamatan laut
- LH.03 Latihan Operasi Udara Maritim**
- LH.03.01 Latihan Operasi Udara Pemantauan Maritim**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan latihan operasi udara pemantauan maritim.
- LH.03.02 Latihan Operasi Udara Keselamatan Maritim**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan latihan operasi udara keselamatan maritim.
- LH.04 Dukungan Latihan**
- LH.04.01 Materi**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan dukungan materi latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
- LH.04.02 Sumber Daya Manusia**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan dukungan sumber daya manusia dalam rangka latihan operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
- LH.04.03 Logistik Latihan**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan dukungan logistik dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
- DT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**
- DT.01 Rancang Bangun Sistem/Design Sistem Informasi dan Komunikasi**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan rancang bangun sistem/ design sistem informasi dan komunikasi keamanan dan keselamatan laut.
- DT.02 Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut**
- DT.02.01 Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi**
Naskah yang berkaitan dengan Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut.

- DT.02.02 Pengelolaan Pertukaran Informasi**
Naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, pengklasifikasian, pengolahan, penyajian hingga pertukaran informasi keamanan dan keselamatan laut.
- DT.03 Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan sistem peringatan dini terkait keamanan dan keselamatan laut.
- DT.04 Data Keamanan dan Keselamatan Laut**
 - DT.04.01 Perancangan dan Standarisasi Data Keamanan dan Keselamatan Laut**
Naskah yang berkaitan dengan perancangan dan standarisasi data Keamanan dan Keselamatan Laut, mulai dari penyiapan bahan perancangan, pengumpulan, pengklasifikasian data dan standarisasi data.
 - DT.04.02 Pengolahan Basis Data Keamanan dan Keselamatan Laut**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan Basis Data Keamanan dan Keselamatan Laut, mulai dari penyiapan bahan pengolahan hingga penyajian basis data keamanan dan keselamatan laut.
- DT.05 Jaringan Keamanan dan Keselamatan Laut**
 - DT.05.01 Pengembangan Jaringan Keamanan dan Keselamatan Laut**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan jaringan Keamanan dan Keselamatan Laut.
 - DT.05.02 Pemeliharaan Jaringan Keamanan dan Keselamatan Laut**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan Jaringan Keamanan dan Keselamatan Laut.
 - DT.05.03 Pemantauan Data dan Jaringan Satelit**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan data dan jaringan satelit.
 - DT.05.04 Dokumentasi Data dan Jaringan Satelit**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi data dan jaringan satelit.
- KS KERJASAMA LEMBAGA**
 - KS.01 Kerjasama Dalam Negeri**
 - KS.01.01 Kerja Sama Lembaga Pemerintah**
Naskah yang berkaitan dengan MoU/Kontrak/Perjanjian Kerjasama dengan lembaga pemerintah, mulai dari telaah/kajian/evaluasi, Risalah pembuatan MoU, rancangan draft awal, rancangan draft akhir, Memori Perjanjian hingga naskah asli yang ditandatangani.
 - KS.01.02 Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah**
Naskah yang berkaitan dengan MoU/Kontrak/Perjanjian Kerjasama dengan lembaga non pemerintah, mulai dari telaah/kajian/evaluasi, Risalah pembuatan MoU, rancangan draft awal, rancangan draft akhir, Memori Perjanjian hingga naskah asli yang ditandatangani.
 - KS.02 Kerjasama Luar Negeri**

- KS.02.01 Kerja Sama Bilateral dan Regional**
Naskah yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama/MoU/Kontrak bilateral dan regional, mulai dari telaah/kajian/evaluasi, Risalah pembuatan MoU, rancangan draft awal, rancangan draft akhir, Memori Perjanjian hingga naskah asli yang ditandatangani.
- KS.02.02 Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional**
Naskah yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama/MoU/Kontrak multilateral dan organisasi internasional, mulai dari telaah/kajian/evaluasi, Risalah pembuatan MoU, rancangan draft awal, rancangan draft akhir, Memori Perjanjian hingga naskah asli yang ditandatangani.
- KS.03 Pengembangan Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut**
- KS.03.01 Potensi Keamanan Laut**
Naskah yang berkaitan dengan pengembangan potensi masyarakat terkait keamanan laut melalui kegiatan bimtek dan evaluasi.
- KS.03.02 Potensi Keselamatan Laut**
Naskah yang berkaitan dengan pengembangan potensi masyarakat terkait keselamatan laut melalui kegiatan bimtek dan evaluasi.
- HK HUKUM**
- HK.01 Program Legislasi**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi Badan Keamanan Laut maupun program legislasi nasional.
- HK.02 Produk Hukum**
- HK.02.01 Produk Hukum yang bersifat pengaturan**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti Peraturan perundang-undangan, Pedoman, Petuniuk Pelaksanaan, Instruksi, Prosedur Tetap (Protap), Surat Edaran di bidang keamanan dan keselamatan laut mulai dari persiapan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya.
- HK.02.02 Produk Hukum yang bersifat penetapan**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan), yaitu Keputusan tentang Penetapan Kegiatan dan Keputusan tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan di bidang kearsipan sejak awal proses hingga penandatanganan.
- HK.03 Dokumentasi Hukum**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum dan penyebarluasan informasi hukum.
- HK.04 Penyuluhan, Sosialisasi, dan Pelatihan Hukum**
- HK.04.01 Penyuluhan Hukum**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan hukum kepada lembaga maupun perorangan.
- HK.04.02 Sosialisasi Hukum**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan.

- HK.04.03 Pelatihan Hukum**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan hukum
- HK.05 Advokasi/Bantuan/ Konsultasi Kasus/Sengketa Hukum**
- HK.05.01 Pidana**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi/bantuan/konsultasi kasus/sengketa hukum pidana.
- HK.05.02 Perdata**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi/bantuan/konsultasi kasus/sengketa hukum perdata.
- HK.05.03 Tata Usaha Negara**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi/bantuan/konsultasi kasus/sengketa hukum tata usaha negara.
- HK.05.04 Arbitrase**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi/bantuan/konsultasi kasus/sengketa arbitrase.
- HK.05.05 Perburuhan**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi/bantuan/konsultasi kasus/sengketa perburuhan.
- HK.06 Telaah Hukum**
- HK.06.01 Telaah Hukum Internal**
Naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat berwenang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- HK.06.02 Telaah Hukum Eksternal**
Naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan pejabat berwenang instansi selain Badan Keamanan Laut.
- HK.06.03 Telaah Perjanjian**
Naskah yang berkaitan dengan penelaahan kontrak, perjanjian, dan kerja sama.
- HK.06.04 Telaah Akta**
Naskah yang berkaitan dengan penelaahan akta, dan berita acara.
- HK.07 Perizinan**
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perizinan.